Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya

Muhammad Arifin¹, Koko Prasetya², Johan Vivaldi Alex Sander³, Khusnul
Khothimah⁴, Rhea Ardhana⁵

Mahasiwa Administrasi Negara, FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur

Email korespondensi: Arifin.ribero9914@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan dibidang teknologi informasi. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan maju tuntutan akan kebutuhan semakin banyak. Semakin banyaknya tuntutan tersebut dibutuhkan suatu inovasi atau terobosan baru dari para petinggi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi yang ada pemerintah membuat kebijakan berbasis elektronik yaitu e-government. Dari adanya sistem baru tersebut yang berbasis elektronik memudahkan dalam menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan yang di lakukan oleh aparatur negara kepada masyarakatnya. Sebagai contoh inovasi yang dilakukan aparatur negara yaitu menciptakan proses penilangan yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual dan saat ini telah menjadi sistem tilang berbasis elektronik atau bisa kita sebut sebagai e-tilang. Namun dari pelaksanaan sistem baru tersebut masih terdapat pelanggaran dikarenakan kesadaran masyarakat yang dirasa kurang dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur berwajib untuk menginformasikan e-tilang tersebut masih kurang mencakup keseluruhan dari masyarakat yang ada.

Kata kunci : Kesadaran Masyarakat, E-Government, E-tilang

Abstract

In Indonesia, there has been progress in the field of information technology. As technology develops is increasingly sophisticated and developed of demands for needs becomes more and more. The increasing number of demands an innovation or a new breakthrough is needed from the country's top brass to prosper the community. By utilizing sophistication existing technological advancements the government makes policy electronic based the name is e-government. From the existence of the new system that based on electronic makes it easy to organize he implementation of services carried out by the state apparatus to the community. As an example of the innovation carried out the state apparatus that is creating a traffic ticket process previously using a manual system and now has become a trafficking ticket process system or we can call it an e-tilang. But from the implementation of the new system there are still violations because public awareness is deemed lacking and socialization conducted by the authorities to inform e-tickets it still does not cover the whole of the existing community.

Keywords: Community Awareness, E-government, E-tilang

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Perkembangan yang pesat dari IPTEK membuat sektor publik mengalami reformasi birokrasi dalam mengejar ketertinggalan IPTEK. Pesatnya perkembangan TIK akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan (*to create*), mengakses (*to access*), mengolah (*to process*), dan memanfaatkan (*to utilize*) informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk Pemda) secara berkelanjutan (Hasibuan 2007). Salah satunya dilakukan oleh kepolisian republik Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Perhubungan. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan manajemen publik diwujudkan dalam suatu program penyempurnaan dari tilang manual bertransformasi menjadi tilang berbasis elektronik. Hal ini banyak menghadapi tantangan dalam proses implementasinya terkait mekanisme di dalamnya yang perlu pengembangan dan penyempurnaan, *e-government* khususnya e-tilang datang untuk mengatasi serta menyelesaikan berbagai pelanggaran lalu lintas.

E-Tilang adalah proses penilangan yang dilakukan pihak kepolisian kepada para pelanggar lalu lintas yang berbeda dengan penilangan pada umumnya yang masih harus dicatat secara manual di atas selembar kertas blanko atau surat tilang. Dalam (Setiyanto, Gunarto, and Endah Wahyuningsih 2017) Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Selain itu dengan adanya E-tilang diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menipiskan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan *e-banking*, ATM, atau datang sendiri ke teller (Cermati.com 2017).

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem E-Tilang. Pada awal kemunculan E-Tilang muncul pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai kebijakan sistem e tilang ini. Masyarakat menganggap E-Tilang sebagai kebijakan yang kurang tepat karena bisa saja salah sasaran saat akan melakukan penilangan pada pengguna kendaraan bermotor. Ada juga sebagian masyarakat yang menganggap E-Tilang merupakan sebuah inovasi terbaru dari pemerintah yang sangat efektif. Karena dengan menggunakan system E-Tilang menandakan kemajuan yang baik bagi sistem penertiban lalu lintas yang ada. Dengan munculnya system E-Tilang pemerintah mengharapkan agar masyarakat sebagai pengguna jalan akan lebih tertib, teratur dan taat saat berkendara di jalan raya.

Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan sistem e-tilang di Kota Surabaya, dapat diketahui seberapa besar tingkat kesadaran

masyarakat mengenai sistem e-tilang yang telah berjalan ini. Dengan pemaparan tersebut, maka dapat dilihat mengenai urgensi mengenai adanya penerapan kebijakan sistem e-tilang. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan sistem e-tilang di Kota Surabaya.

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah ntuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kota Surabaya tentang penerapan sistem E-tilang.

2. TINJAUAN PUSTAKA (*PREVIOUS FINDINGS*)

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal yang menjadi acuan bagi penulis.

Penelitian pertama yang di temukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh (Junef 2014) yang berjudul “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas dan untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan studi kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan, kemudian dengan pendekatan deskriptif yuridis yaitu dengan mengacu kepada ketentuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan belum adanya perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) akibatnya masih banyak kecelakaan, kemacetan dan polusi udara, serta pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat masyarakat masih kurang patuh dan memperhatikan aturan aturan yang ada saat berlalu lintas. Perlu kebijakan hukum yang tegas terhadap perilaku masyarakat, hal ini sebagai upaya untuk meniadakan kerawanan, ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna menunjang pembangunan nasional kedepannya.

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, Amalia, and Fitriah 2018) yang berjudul “Hubungan Relijiusitas dengan *Self Awareness* Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) UAI”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara relijiusitas dengan self awareness pada mahasiswa/i prodi BPI (konseling) UAI. Dimana self awareness merupakan kecerdasan pemahaman diri sesuai dengan situasi dan kondisi, yang memiliki faktor penunjang bagi penguatan *self awareness*. Keberagamaan seseorang menjadi faktor penentu bagi bagaimana bersikap, kepeduliaannya dan

lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bahwa religiutas mahasiswa pada penelitian ini dapat meningkatkan self awareness. Hal ini disebabkan dimensi keberagamaan meningkatkan kesadaran diri, lebih peka sebagaimana agama adalah untuk menata kehidupan manusia agar lebih baik, bahagia dan selamat dunia akhirat. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil penelitian menunjukan bahwa 14,5% dari hail tersebut relijiusitas berpengaruh pada *self awareness*.

Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7) (Medium.com 2017). Menurut Thomas R. Dye (1992), *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. (Anggara 2014)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah rumusan dari hasil pemikiran oleh individu atau kelompok yang berlandaskan pada kepentingan publik demi terjuwudnya kesejahteraan bersama. Seperti pemerintahan yang dimana usulan tersebut dibentuk untuk suatu hambatan atau permasalahan yang ada disuatu lingkungan dan daerah.

2. Kesadaran Masyarakat terhadap Kebijakan

A. Kesadaran

Menurut A. W. Widjaja (1997: 14), Kesadaran adalah sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada (Widyaningsih 2013). Menurut konsep Suryamentaram (2004), *Self – awareness* atau kesadaran diri adalah sebagai cara latihan (memilah–milah) rasa sendiri dengan rasa orang lain untuk meningkatkan kemampuan menghayati rasa orang lain sebagai manifestasi tercapainya pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang sheat dan sejahtera (Akbar, Amalia, and Fitriah 2018). Dari beberapa pendapat mengenai kesadaran, kesadaran diri dan masyarakat dapat menjadi kesinambungan membentuk suatu kesimpulan perihal kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat merupakan sikap atau perilaku manusia yang membentuk suatu interaksi pada lingkungan yang diikuti dan terikat oleh rasa identitas bersama.

B. Indikator Kesadaran

Menurut Soejono Soekanto (2015 : 10), kesadaran akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum (Saputra and Akmal 2019). Secara teori keempat indikator inilah peneliti menjadikannya sebagai tolak ukur dari kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh indikator – indikator diatas terhadap kebijakan penerapan sistem e-tilang yang berlaku di kota Surabaya. Berikut uraian masing – masing indikatornya :

1. Pengetahuan

Hal ini berkaitan pada pengetahuan masyarakat terkait kebijakan e-tilang di surabaya, bagaimana sosialisasi dari pelaksana kebijakan mengenai arus informasi didalamnya.

2. Pemahaman

Pemahaman hukum pada kebijakan penerapan sistem e-tilang berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang diberikan saat terjadi pelanggaran di dalam kebijakan sistem e-tilang di kota surabaya.

3. Sikap

Sikap hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan penerapan sistem e-tilang. Dimana masyarakat akan menanggapi kebijakan tesebut dengan menaati kebijakan tersebut atau malah melanggar peraturan tersebut.

4. Perilaku

Hal ini mengenai kepatuhan aturan lalu lintas bagi masyarakat. Masyarakat sebagai terdampak kebijakan melalui adanya e-tilang diharapkan pelanggaran yang terjadi pada kepatuhan aturan lalu lintas dapat berkurang serta memberikan efek jera kepada masyarakat melanggar lalu lintas melalui kebijakan e-tilang.

C. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut (Maxmanroe.com 2019). Pengertian masyarakat **menurut Paul B. Horton** yaitu sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu (SeputarPengetahuan.com 2016). Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan komponen yang berpengaruh didalam tatanan sosial dan berkesinambungan dengan pemerintahan pada suatu negara tempat tinggalnya.

D. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh (Syafii 2016). **Sedangkan** menurut John Mc Manama menyatakan bahwa Sistem ialah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari suatu fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang saling bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dengan secara efektif dan efisien (GuruPendidikan.com 2019). Dari beberapa pengertian tentang sistem di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem memiliki artian yaitu suatu struktur atau kesatuan dari beberapa komponen yang tersusun dan saling berhubungan untuk bekerjasama agar mencapai tujuan dari suatu organisasi.

E. E-Government

E-Government merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian E-Government yang lain yaitu suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik (E-government 2012). Pemerintah New Zealand di pihak lain mendeskripsikan e-government sebagai sebagai berikut : E-goverment adalah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru untuk memberi masyarakat yang lebih nyaman untuk mengakses informasi dan layanan pemerintahan, untuk meningkatkan kualitas layanan dan untuk memberikan peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam lembaga dan proses yang demokratis (Ardianto 2007). Dari beberapa pengertian diatas tentang e-government bisa ditarik kesimpulan bahwa e-government merupakan suatu sistem kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan layanan dan informasi berbasis teknologi demi memudahkan pemerintah dalam memberikan transparansi dan layanan kepada masyarakat.

F. E-Tilang

Secara harfiah e-tilang bisa diartikan proses penilangan yang tidak lagi di lakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik (Moladin.com 2017). Sistem e-tilang ini membuat petugas tidak perlu repot dalam menilang para pengendara hanya dengan mencatat data diri pelanggar, jenis pelanggaran yang dilakukan, dan jumlah besar sanksi yang diberikan ke pelanggar. Menurut Prastica Wibowo (2016) dalam (Rakhmadani 2017) menyebutkan e-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga

membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem e-tilang ini juga melihat pengemudi yang mengemudikan kendaraan yang membahayakan. Dalam (Hajeb et al. 2013) *Some typical examples from court cases of dangerous driving are:*

- *Speeding, Racing, Weaving*
- *Ignoring traffic lights, road signs*
- *Overtaking dangerously*
- *Knowing the vehicle has a dangerous fault or an unsafe load*
- *Permitting to drive without valid license*
- *Drove on wrong side of divided highway*

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-tilang merupakan suatu sistem dalam proses penilangan menggunakan teknologi. Dengan menggunakan e-tilang, maka akan lebih efektif dan efisien karena memudahkan masyarakat untuk tidak perlu datang ke sidang pengadilan dan mengurangi tindakan suap menyuap antara penegak hukum dengan pelanggar.

Model Penelitian

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik (Rakhmadani 2017). Dalam sistem penerapan e-tilang dibutuhkan kesadaran untuk mendukung penerapannya di Surabaya.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian *based on theory*. Berikut teori-teori tentang kesadaran masyarakat terhadap implementasi kebijakan :

A1. Indikator kesadaran masyarakat menurut (Saputra and Akmal 2019):

A2. Indikator implementasi kebijakan menurut (Wisakti, 2008) dalam jurnal (Richard and Dkk 2018) sebagai berikut :

- (1) Standar dan sasaran kebijakan;
- (2) Sumberdaya;
- (3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- (4) Karakteristik agen pelaksana;

(5) Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik ,

Penerapan sistem tilang di Surabaya dilakukan oleh petugas yang akan melakukan penilangan kepada pengendara yang melanggar dengan memberhentikan kendaraan lalu memberi surat keterangan penilangan dan menyita barang atau suatu surat sebagai jaminan. Sistem tilang seperti itu sudah ketinggalan zaman karena terasa kurang efektif dan masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan sistem tilang di Surabaya. Dari setiap permasalahan yang terjadi maka dibuatlah sistem e-tilang yang lebih efektif agar masyarakat dalam berlalu lintas lebih teratur. Namun dalam pelaksanaan e-tilang ini masyarakat masih belum terlalu positif dalam kesadaran ke penerapan kebijakan tersebut. Masih ada pengendara yang masih melanggar dalam berlalu lintas walaupun sudah diterapkannya e-tilang. Maka pemerintah dan petugas perlu melakukan penegasan yang lebih agar pengendara menaati peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam kesadaran masyarakat dalam penerapan e-tilang ini dapat digambarkan:

3. METODOLOGI PENELITIAN (*RESEARCH METHODOLOGY*)

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan menjelaskan secara terperinci dari obyek penelitian dan hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mengenai kesadaran masyarakat terkait sistem e-tilang. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang akan ditarik secara acak berdasarkan area. Yang terdiri dari 31 kecamatan di Surabaya yaitu Tegalsari, Genteng, Bubutan, Simokerto, Gubeng, Wonokromo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggiling, Pabean Cantian, Semampir, Krembangan, Kenjeran, Bulak, Tambaksari, Tandes, Sukomanunggal, Asemrowo, Benowo, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Dukuh Pakis, Pakal, Jambangan, Gayungan, Wonocolo, Karang Pilang, Wiyung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian

berupa 200 kuisioner dan instrumen dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk mendapatkan data. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Dengan statistik deskriptif, peneliti dapat menyajikan data dengan ringkas dan mendeskripsikan data sampel. Setelah itu, validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber data supaya diperoleh data yang absah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*RESULTS AND FINDINGS ANALYSIS*)

Pada penelitian ini obyek penelitian yang digunakan adalah kesadaran masyarakat terkait e-tilang, sedangkan subyek penelitian yang digunakan yaitu masyarakat Kota Surabaya. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah sampel acak berdasarkan area dengan menyebarkan 200 kuisioner yang akan diisi oleh responden di Kota Surabaya dalam 31 kecamatan yaitu ; Tegalsari, Genteng, Bubutan, Simokerto, Gubeng, Wonokromo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Tenggilis, Pabean Cantian, Semampir, Krembangan, Kenjeran, Bulak, Tambaksari, Tandes, Sukomanunggal, Asemrowo, Benowo, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Dukuh Pakis, Pakal, Jambangan, Gayungan, Wonocolo, Karang Pilang, Wiyung. Hal lain yang dapat menjadikan gambaran penelitian ini mengenai deskripsi data penelitian terkait karakteristik penelitian dan data penelitian melalui penjelasan dibawah ini. Pengumpulan data kuantitatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner menggunakan kuisioner online melalui penyebaran link kuisioner dengan *Google Driver* dan kuisioner offline dimana peneliti menyebarkan secara langsung kepada responden yaitu masyarakat Kota Surabaya yang tersebar di 31 kecamatan. Didapatkan karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan terakhir.

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Responden (n=200)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	97
2	Perempuan	103
	Jumlah Responden	200

Sumber : data primer diolah (kuisoner)

Dilihat dari data kuesiner yang diperoleh di kota Surabaya terdapat 97 laki-laki dan 103 perempuan yang mengisi kuisoner.

Tabel 4.2

Rentang Usia Responden (n=200)

No	Rentang Usia	Jumlah
1	17-21	146
2	22-26	18
3	27-31	5
4	32-36	10
5	37-41	6
6	42-46	5
7	47-51	7
8	52-56	2
9	57-62	1
	Jumlah Responden	200

Sumber : data primer diolah (kuisoner)

Dari data kuisoner yang diperoleh oleh peneliti di daerah Surabaya bisa dilihat bahwa orang yang bersedia mengisi kuisoner yaitu berumur 17-62 tahun. Namun jika perhatikan rata-rata yang paling banyak bersedia mengisi kuisoner yaitu berumur 17-36 tahun dan sisa nya orang-orang yang berumur 37-62 tahun yang mengisi kuisoner hanya sedikit dikarenakan kurang bersedia untuk mengisinya.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden (n=200)

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	2
3	SMP	6
4	SMA/SMK	178
5	Diploma	3
6	S1	10
7	S2	1
8	S3	-
	Jumlah Responden	200

Sumber : data primer diolah (kuisoner)

Dari data tabel diatas bisa dilihat peneliti mendapat data kuisoner dengan menggunakan teknik random sampling. Rata-rata responden memiliki latar belakang pendidikan akhir yang baik yaitu telah melalui 6 tahun wajib belajar.

Tabel 4.14

		N	Marginal Percentage
Status	Low	8	4.0%
	Medium	51	25.5%
	High	141	70.5%
Rubric	Sangat Tidak Setuju	1	.5%
	Tidak Setuju	7	3.5%
	Cukup Setuju	51	25.5%
	Setuju	110	55.0%
	Sangat Setuju	31	15.5%
Valid		200	100.0%
Missing		9	
Total		209	

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa klasifikasi menurut peneliti terbagi menjadi 3 yaitu Low, Medium, dan High dengan masing-masing presentase 4%, 25.5%, dan 70.5%. Dengan jumlah 209 responden terlihat bahwa masyarakat Kota Surabaya setuju mengenai sistem e-tilang yang berlaku dan sadar akan adanya sistem e-tilang di Surabaya dengan presentase 55% yang dapat kita simpulkan bahwa masuk kedalam kategori High yang berpresentase 70.5%. Dengan pernyataan diatas hasil pengolahan data primer dari kuisioner yang tersebar kepada responden menunjukkan belum adanya pengaruh positif terhadap kebijakan sistem e-tilang yang diimplementasikan. Dalam hal ini memiliki korelasi dengan kebijakan e-tilang dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, pada sisi kesadaran masyarakat terdapat konjungsi sifat terbalik dari adanya sistem kebijakan e-tilang. Pengartiannya adalah bahwa masyarakat telah sadar dengan keberadaan sistem e-tilang tetapi tingkat kepatuhan yang belum secara menyeluruh diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat terkait pentingnya berkendara yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini meliputi unsur.

Indikator kesadaran masyarakat menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Saputra & Akmal, 2019)

Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori yang Relevan

Pembahasan penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat surabaya tentang penerapan sistem e-tilang. Setelah dilakukannya perhitungan pada kuisioner yang telah terisi oleh responden. Secara teori kesadaran yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn, keempat indikator inilah peneliti menjadikannya sebagai tolak ukur dari kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh indikator – indikator diatas terhadap kebijakan penerapan sistem e-tilang yang berlaku di kota Surabaya. Berikut uraian masing – masing indikatornya : Pengetahuan, Hal ini berkaitan pada pengetahuan masyarakat terkait kebijakan e-tilang di surabaya, bagaimana sosialisasi dari pelaksana kebijakan mengenai arus informasi didalamnya. Pemahaman, Pemahaman hukum pada kebijakan penerapan sistem e-tilang berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang diberikan

saat terjadi pelanggaran di dalam kebijakan sistem e-tilang di kota surabaya. Sikap, Sikap hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan penerapan sistem e-tilang. Dimana masyarakat akan menanggapi kebijakan tersebut dengan menaati kebijakan tersebut atau malah melanggar peraturan tersebut. Perilaku, Hal ini mengenai kepatuhan aturan lalu lintas bagi masyarakat. Masyarakat sebagai terdampak kebijakan melalui adanya e-tilang diharapkan pelanggaran yang terjadi pada kepatuhan aturan lalu lintas dapat berkurang serta memberikan efek jera kepada masyarakat melanggar lalu lintas melalui kebijakan e-tilang.

5. IMPLIKASI PENELITIAN (*IMPLICATION*)

Perbaikan ataupun pengembangan sistem e-tilang perlu dilakukan secara berkala, karena mengingat masih banyaknya Masyarakat Surabaya yang meremehkan adanya e-tilang. Dan kurang adanya penegasan aparat terkait terhadap masyarakat yang melanggar. Dalam setiap kebijakan, dukungan dan saling koordinasi dari setiap lembaga ataupun setiap instansi itu perlu, karena agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien.

6. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, pengambilan data menggunakan teknik kuisioner dan instrumen dokumentasi yang dilaksanakan di Surabaya yang dilakukan terhadap 209 responden mengenai tingkat kesadaran masyarakat Surabaya tentang penerapan sistem E-tilang. Setelah dilakukan pengolahan data dengan metode random sampling beserta analisisnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Surabaya setuju mengenai adanya sistem baru dalam penilangan yaitu adanya sistem elektronik tilang (E-tilang). Dan mereka pada dasarnya sadar mengenai adanya sistem baru tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan presentase sebesar 55% yang termasuk dalam kategori High yang berpresentase 70.5%.
2. Meskipun masyarakat Surabaya setuju dan sadar akan adanya sistem e-tilang, tetapi untuk penerapannya masih sangat kurang. Karena dapat dilihat dari yang ada di lapangan, masih banyak pengguna jalan yang melanggar lalu lintas seperti melanggar

marka jalan, melanggar rambu-rambu, melanggar lampu lalu lintas, dan lain sebagainya dapat dibuktikan dengan grafik pelanggaran tilang pada tabel 4.2 yang masih mengalami naik turun pada grafik tersebut.

Saran

Agar e-tiang dapat terealisasi dan dapat diterapkan efektif dengan baik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi maka perlu di perbaiki atau dikembangkan lagi system atau mekanisme dalam prosedur pelaksanaannya. Perlu adanya berbagai dukungan dari setiap Lembaga, instansi maupun perusahaan agar di dalam penerpannya semakin membaik. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara petugas penegak lalu lintas seperti kepolisian, pengadilan negeri, Bank Rakyat Indonesia atau bank-bank lain, dan kejaksaan negeri selaku instansi yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaannya.

Diperlukan sosialisasi yang lebih meluas dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini seperti TV atau mungkin melalui media website seperti youtube dari para petinggi negara tentang penerapan e-tilang ini kepada masyarakat agar bias menjangkau setiap daerah. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami ataupun mengetahui apa itu e-tilang. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif dan efisien akan memicu masyarakat untuk menyadari dan mengetahui tentang keberadaan dari penerpan e-tilang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Anggara, S. D. M. S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.; Tim Redaksi Pustaka Setia, ed.). Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ardianto, N. S. . (2007). *Good e-Goverment : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment* (1st ed.; I. B. Wahyudi, SetiyonoYuyut Setyorini, ed.). Malang: Bayumedia.
- Syafiie, I. K. D. H. M. S. (2016). *Sistem Administrasi Negara* (10th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Akbar, M. Y. A., Amalia, R. M., & Fitriah, I. (2018). Hubungan Relijiusitas dengan Self Awareness Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) UAI. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(4), 265–270.
- E-government, I. (2012). Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. *JEAM*, 11(1), 1–19.
- Hasibuan, Z. A. (2007). Langkah-langkah Strategia dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda. *Sistem Informasi MTI UI*, 3(1), 1–5.
- Hajeb, S., Javadi, M., Hashemi, S. M., & Parvizi, P. (2013). *Traffic Violation Detection System Based on RFID*. 7(December 2016), 290–293.
- Richard, D., & Dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 101–111.
- Saputra, B., & Akmal. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kurangi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 71–82.
- Setiyanto, Gunarto, & Endah Wahyuningsih, S. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754–766.
- Widyaningsih, N. D. (2013). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat Dengan Kesadaran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Educitizen*, 1(1), 68–77.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 7(3), 663–671.